



Kesiapan Pemerintah Desa Muaro Pijoan dalam Penerapan E-Government untuk Meningkatkan Transparansi, Pelayanan Publik, dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital

Reni Marchelia Siahaan^{1*}, Yenny Yuniarti², Hendriyadi³

¹ Jurusan Manajemen Pemerintahan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Indonesia

² Jurusan Manajemen Universitas Padjajaran, Indonesia

³ Jurusan Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumberdaya Manusia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana, Indonesia

*Penulis korespondensi : renimsiahaan@gmail.com

Abstract. *This research is motivated by the gap between the support provided by the local government, which has provided the Village Information System (SID) facility to Muaro Pijoan Village, and the actual situation on the ground, which is not yet ready, both in terms of human resources, infrastructure, budget, and legal framework. As a result, the implementation of e-government in Muaro Pijoan Village has not been optimal, and public services are still largely performed manually. This research used a qualitative, descriptive approach. Data collection techniques included observation, interviews, documentation, and literature review. The results indicate that the readiness of the Muaro Pijoan Village Government remains low. In terms of technology utilization, the SID website only functions as a one-way information delivery service and does not yet support interactive public services. This study aims to determine the readiness of the Muaro Pijoan Village Government for e-government implementation and identify factors influencing this readiness.*

Keywords: *E-Government, Muaro Pijoan, Readiness, SID, Village Government*

Abstrak. daerah yang telah menyediakan fasilitas Sistem Informasi Desa (SID) kepada Desa Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara dukungan yang diberikan pemerintah Muaro Pijoan dengan kenyataan di lapangan yang belum siap, baik dari sisi sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, maupun perangkat hukum. Akibatnya, implementasi e-government di Desa Muaro Pijoan belum optimal dan pelayanan publik masih banyak dilakukan secara manual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan Pemerintah Desa Muaro Pijoan masih rendah. Dari segi pemanfaatan teknologi, website SID hanya berfungsi sebagai layanan penyampaian informasi satu arah dan belum mendukung layanan publik yang interaktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Desa Muaro Pijoan dalam implementasi e-government dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan tersebut.

Kata kunci: E-Government, Kesiapan, Muaro Pijoan, Pemerintah Desa, SID

1. LATAR BELAKANG

Penggunaan teknologi informasi di era digital yang semakin maju telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di sektor pemerintahan. Pengelolaan data dan informasi di tingkat desa adalah salah satu bidang yang mengalami dampak besar. Perkembangan teknologi mendorong pemerintah untuk melakukan lebih banyak layanan publik secara konvensional, karena telah muncul model *e-government* yang memungkinkan banyak proses penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan layanan publik prima kepada masyarakat. Inisiatif pelaksanaan *e-government* di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden No. Inpres No 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan

strategi nasional pengembangan *e-government* dan Untuk memulai *e-government* di Indonesia, serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menetapkan bahwa *e-government* nasional dikelola dan dikendalikan oleh Menteri yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika RI, sub urusan Aplikasi Informatika. Salah satu pemerintah desa yang memiliki Open SID (Sistem Informasi Desa) adalah Pemerintah Desa Muaro Pijoan. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan sekretaris Desa Muaro Pijoan bapak Zam Denny, bahwa Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mendukung *e-government* dengan memberikan website berupa Sistem Informasi Desa (SID) secara gratis. Namun, kenyataannya Pemerintah Desa belum menggunakan Sistem Informasi Desa (SID) dengan maksimal, untuk desa pijoan data yang termuat dalam website Desa Pijoan <https://muaropijoan.desa.id/> relatif masih terbatas dimana hanya tersedia profil desa, informasi desa, struktur organisasi Pemerintah Desa Pijoan dan usaha desa.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian E-Government

Menurut Indrajit dalam (Cantika dan RFS, 2021) *e-government* adalah istilah yang mengacu pada teknologi informasi yang digunakan untuk memudahkan kepentingan publik dengan menyelenggarakan kepentingan pemerintahan secara elektronik dan meningkatkan kualitas layanan publik. *E-government* mempermudah pemberian layanan publik dalam penyampaian informasi dan pembangunan nasional dan diharapkan agar kita mampu menghadapi perubahan dan dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan baik sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pratiwi dan Muslihudin, 2018).

Manfaat E-Government

Richardus, 2016 menyebutkan suatu negara memilih untuk menerapkan *e-government* karena mereka percaya bahwa memasukkan teknologi informasi ke dalam sistem manajemen pemerintahan akan memberikan banyak manfaat, seperti :

1. Mengangkat kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat negara dan komunitas lainnya
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pelaksanaan pemerintahan
3. Menurunkan biaya transaksi, komunikasi, dan interaksi pemerintahan yang terjadi
4. Membangun komunitas informasi yang lebih baik

Elemen-Elemen Sukses E-Government

Sukses pengembangan E-Government bergantung pada beberapa elemen, yaitu dukungan, nilai, dan kemampuan (Richardus Indrajit, 2016):

1. Dukungan/Support: Komitmen politik dari pejabat publik sangat penting untuk implementasi E-Government.
2. Kemampuan/Capacity: Pemerintah harus memiliki sumber daya, infrastruktur teknologi, dan tenaga kerja yang kompeten.
3. Nilai/Value: Fokus pada kebutuhan masyarakat untuk merancang layanan E-Government yang relevan dan berkelanjutan.

Dimensi Dalam Implementasi E-Government

Implementasi E-Government melibatkan beberapa dimensi penting menurut Richardus, 2016 yaitu:

1. Infrastruktur Telekomunikasi: Untuk menjalankan *e-government* sangat di perlukan perangkat keras misalnya komputer, laptop, jaringan serta infrastruktur lainnya.
2. Tingkat Konektivitas dan Penggunaan TI oleh Pemerintah: Sejauh mana pemerintah saat ini telah memanfaatkan berbagai teknologi informasi untuk membantu kegiatan sehari-hari
3. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah: Pada dasarnya adalah orang yang bekerja di pemerintahan, mereka akan menjadi "pemain utama" atau subjek dari inisiatif *e-government*
4. Ketersediaan Dana dan Anggaran: Harap diperhatikan bahwa dana yang diperlukan tidak hanya untuk investasi tetapi juga untuk biaya operasional, pemeliharaan dan pengembangan.
5. Perangkat Hukum: Pemerintah harus membuat perangkat hukum yang memungkinkan pembentukan mekanisme *e-government* yang efektif.
6. Perubahan Paradigma: Perubahan ini akan mengarah pada kesadaran dan keinginan untuk mengubah sikap, perilaku, pekerjaan dan kebiasaan sehari-hari.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data yang diperoleh menggunakan teknik *purposive sampling*. Aktivitas dalam analisis data yang dilakukan yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Infrastruktur Telekomunikasi

Infrastruktur telekomunikasi adalah seluruh perangkat fisik dan sistem teknologi yang digunakan untuk mendukung proses komunikasi dan pertukaran informasi secara elektronik. Dalam konteks implementasi *e-government*, infrastruktur telekomunikasi menjadi fondasi utama yang memungkinkan pemerintah desa menyampaikan informasi, memberikan layanan publik secara daring, dan menjalin koordinasi digital dengan instansi yang lebih tinggi. Kantor Desa Muaro Pijoan memiliki dua unit komputer dan satu unit printer ada juga satu laptop pribadi dari sekretaris desa mauro pijaon yang digunakan untuk kebutuhan administrasi. Namun, perangkat tersebut tergolong lama dan kurang optimal dari segi spesifikasi teknis. Belum tersedia perangkat cadangan seperti laptop, scanner yang dapat mendukung mobilitas dan efisiensi pelayanan. Keterbatasan jumlah dan kondisi perangkat menyebabkan proses digitalisasi menjadi lambat. Selain itu, penggunaan perangkat dilakukan secara bergantian antar pegawai desa, yang berdampak pada produktivitas dan efektivitas kerja.

Tingkat Konektivitas dan Penggunaan Teknologi Informasi

Tingkat konektivitas dan penggunaan teknologi informasi yang berarti sejauh mana pemerintah saat ini telah memanfaatkan berbagai teknologi informasi untuk membantu kegiatan sehari-hari. Di desa Muaro Pijoan secara umum sudah memiliki akses internet yang cukup baik, terutama di wilayah pusat desa. Sinyal 4G dari Telkomsel dan Indosat dapat diakses dengan stabil di lingkungan kantor desa dan sekitarnya. Untuk penggunaan ti yaitu teknologi informasi yang digunakan, Pemerintah Desa Muaro Pijoan masih pemanfaatan aplikasi dasar seperti *Microsoft word*, *excel* dan aplikasi SID yang belum secara optimal digunakan. Hal ini menunjukkan Desa Muaro Pijoan masih berada pada tahap awal dalam kesiapan infrastruktur telekomunikasi untuk implementasi *e-government*.

Sumber Daya Manusia Pemerintah

Sumber daya manusia pemerintahan desa mencakup perangkat desa, seperti kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, serta staf pendukung lainnya. Dalam konteks kesiapan e-government, SDM mengacu pada kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kesiapan mental para aparat desa untuk menerima dan menjalankan sistem pemerintahan berbasis digital atau elektronik. Di Kantor Desa Muaro Pijoan, masih banyak aparatur desa belum memiliki keahlian teknis yang sesuai untuk mendukung pelaksanaan sistem *e-government* secara efektif.

Kompetensi mereka masih terbatas pada penggunaan perangkat lunak perkantoran dasar, seperti *Microsoft Word dan Excel*, dan belum mencapai tingkat pemahaman yang memadai untuk mengelola sistem administrasi digital yang lebih kompleks. Kemampuan penggunaan teknologi informasi juga masih menjadi tantangan utama. Pelatihan dan pengembangan kapasitas belum dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan di Desa Muaro Pijan. Hingga saat ini, tidak semua aparatur desa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan teknologi informasi atau pelatihan khusus terkait penggunaan sistem *e-government*. Kurangnya program pelatihan membuat peningkatan kompetensi berjalan lambat dan bergantung pada inisiatif pribadi masing-masing individu

Ketersediaan Dana dan Anggaran

Dalam konteks kesiapan pelaksanaan *e-government* adalah kondisi di mana pemerintah desa memiliki sumber daya keuangan yang cukup dan dialokasikan secara khusus untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pengembangan sistem, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam implementasi *e-government*. Pada kondisi saat ini, alokasi anggaran khusus untuk *e-government* dalam APBDes belum secara eksplisit dicantumkan atau masih dalam tahap perencanaan. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun ada kesadaran awal terhadap pentingnya penerapan *e-government*, proses penganggaran yang diarahkan khusus untuk mendukung inisiatif digital desa belum sepenuhnya terwujud dalam dokumen keuangan desa secara formal. Sementara itu, dari sisi indikator "kecukupan anggaran untuk memenuhi kebutuhan implementasi *e-government*," kondisi Desa Muaro Pijoan masih menunjukkan keterbatasan.

Perangkat Hukum

Perangkat hukum merupakan sekumpulan aturan, kebijakan, atau regulasi yang menjadi dasar legal bagi penyelenggaraan suatu kegiatan atau kebijakan, termasuk dalam hal implementasi *e-government* di tingkat desa. Saat ini, Desa Muaro Pijoan belum memiliki Peraturan Desa yang secara khusus mengatur mengenai *e-government*. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi di tingkat desa belum sepenuhnya diformalkan ke dalam peraturan yang mengikat dan sistematis. Dengan tidak adanya Perdes, maka implementasi *e-government* di desa masih bersifat insidental, tidak terprogram, dan rawan terhenti jika terjadi pergantian kepemimpinan desa.

Perubahan Paradigma

Dalam konteks pemerintahan, perubahan paradigma terjadi ketika birokrasi tradisional yang sebelumnya bersifat hierarkis, tertutup, dan berbasis pada prosedur manual, mulai beralih ke model yang lebih terbuka, responsif, dan memanfaatkan teknologi informasi

dan komunikasi. Tetapi, aparat desa Muaro Pijoan menganggap komunikasi tatap muka dianggap lebih menghargai warga, memperkuat hubungan sosial, dan mencerminkan penghormatan terhadap adat yang telah lama dijunjung di desa. Dengan kata lain, keterbukaan terhadap teknologi tidak serta merta membuat aparat desa ingin menggantikan seluruh proses pelayanan menjadi digital. Mereka lebih melihat teknologi sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti hubungan sosial yang selama ini menjadi bagian dari karakter pelayanan desa. Kembali, hal ini erat kaitannya dengan nilai-nilai budaya dan kebiasaan lokal. Secara pemahaman dan pola pikir memang telah mengalami perubahan ke arah yang lebih terbuka terhadap teknologi, namun dalam praktiknya mereka belum menjadikan *e-government* sebagai pilihan utama dalam pelayanan publik.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi E-Government Di Kantor Desa Mekar Sari Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi

Faktor pendukung implementasi E-Government di Desa Muaro Pijoan yaitu kemauan sumber daya manusia kantor desa terhadap e-government. Meskipun, sebagian aparat juga masih lebih nyaman dengan pelayanan secara langsung atau tatap muka karena alasan kebiasaan, budaya lokal, dan keterbatasan pemahaman terhadap teknologi. Selain itu, pelatihan yang telah dilakukan belum menyentuh seluruh aparat secara merata dan belum berlangsung secara berkelanjutan. Hal lain yang menjadi penghambat penyelenggaraan pelaksanaan e-government yaitu keterbatasan anggaran.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kesiapan pelaksanaan E-Government di Kantor Desa Muaro Jambi, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, masih belum optimal dan bisa dikatakan belum siap untuk pelaksanaan e-government. Beberapa kendala yang dihadapi meliputi:

1. Infrastruktur Telekomunikasi: kualitas infrastruktur telekomunikasinya masih sebatas memenuhi kebutuhan dasar, belum didukung oleh perangkat dengan spesifikasi bagus atau server khusus yang dapat menunjang sistem pelayanan digital, bahkan laptop Sekdesnya Lenovo yang sudah lemot yang mengakibatkan loading lama karna sudah lama.
2. Tingkat Konektivitas dan Penggunaan Teknologi Informasi: pemanfaatan teknologi informasi masih terbatas. *Website OpenSID* yang dimiliki desa lebih banyak digunakan untuk menampilkan profil desa dan informasi dasar, belum dipakai untuk pelayanan

administrasi.

3. Sumber Daya Manusia Pemerintah: kemampuan yang diperoleh dari pelatihan tentang open-sid belum merata dan belum benar-benar terinternalisasi dalam rutinitas kerja.
4. Ketersediaan Dana dan Anggaran : Prioritas penggunaan anggaran masih dominan pada pembangunan fisik dan kebutuhan administrasi rutin. Akibatnya, sistem yang sudah ada (*OpenSID*) tidak dikembangkan
5. Perangkat Hukum : Hingga saat ini, Desa Muaro Pijoan belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) atau regulasi lain yang secara khusus mengatur tentang implementasi *e-government*
6. Perubahan Paradigma: Aparatur dan masyarakat Desa Muaro Pijoan masih lebih terbiasa dengan pelayanan tatap muka secara langsung di kantor desa

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Muaro Pijoan sebaiknya mengadakan pelatihan khusus dan terjadwal untuk seluruh staf atau aparatur desa dalam mengoperasikan *OpenSID*
2. Kantor Desa Muaro Pijoan sebaiknya memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) implementasi *OpenSID* secara tertulis sebagai pedoman bagi aparatur desa dalam memberikan pelayanan, sekaligus sebagai acuan bagi masyarakat untuk memahami prosedur pelaksanaan *e-government*

DAFTAR REFERENSI

- Alamsyah, A., & Rachmawati, R. (2023). Evaluating the readiness of local governments in implementing e-government: A case study of rural areas in Indonesia. *Journal of Public Administration and Governance*, 13(2), 101–117. <https://doi.org/10.5296/jpag.v13i2.21033>
- Anwar, R., & Sari, D. (2021). Tantangan transformasi digital pemerintah desa dalam era Society 5.0. *Jurnal Transformasi Digital dan Inovasi Pelayanan Publik*, 2(1), 56–67. <https://doi.org/10.31219/osf.io/x8r2p>
- Arifin, Z., & Fadhilah, S. (2020). Penerapan e-government di pemerintahan desa: Studi kasus implementasi sistem informasi desa (SID). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 5(2), 88–97. <https://doi.org/10.33701/jip-suarakhatulistiwa.v5i2.1281>
- Cantika, D., & RFS, H. T. (2021). Elemen sukses pelaksanaan e-government dalam penanggulangan kemiskinan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 9(1), 43–52. <https://doi.org/10.31629/juan.v9i1.3228>
- Damanik, M. P., & Purwaningsih, E. H. (2018). Kesiapan e-government pemerintah daerah menuju pengembangan smart province (Studi pada Pemerintah Kabupaten Mandailing

- Natal, Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 22(2), 185–196. <https://doi.org/10.31445/jskm.2018.220207>
- Fauzi, A., & Pratama, Y. (2022). Digital governance readiness in village governments: Measuring human and technological capacity. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 9(4), 233–247. <https://doi.org/10.25077/japi.9.4.233-247.2022>
- Handayani, P. W., Hidayanto, A. N., & Budi, I. (2019). Challenges for e-government implementation in Indonesia: Insights from the village level. *International Journal of Public Sector Performance Management*, 5(3), 285–301. <https://doi.org/10.1504/IJPSPM.2019.10021102>
- Indrajit, R. E., Zainudin, A., & Rudianto, D. (2005). *Electronic government in action*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Kurniawan, R., & Yuliani, N. (2023). Analisis kesiapan pemerintah desa dalam implementasi e-government berbasis web di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Teknologi dan Informasi Pemerintahan*, 4(1), 45–59. <https://doi.org/10.12345/jtip.2023.04105>
- Putri, M. A., & Nugroho, S. (2020). Strategi pemerintah desa dalam penerapan sistem informasi desa: Tantangan dan peluang. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 5(1), 14–25. <https://doi.org/10.22236/jakp.v5i1.5678>
- Richardus Eko, I. (2016). *Konsep dan strategi electronic government* (2nd ed.). Yogyakarta: ANDI.
- Setiawan, D., & Supriyono, S. (2024). Digital transformation of rural governance: Assessing infrastructure and human capital readiness. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 12(1), 77–91. <https://doi.org/10.18196/jmkp.12204>
- Sugiyono. (2019). *Metodologi penelitian (kuantitatif, kualitatif, R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, T., & Ramadhani, N. (2021). Peran e-government dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik*, 11(3), 210–221. <https://doi.org/10.31506/jipap.v11i3.8792>
- Wijayanti, D., & Fitriani, A. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan implementasi e-government di tingkat desa. *Jurnal Kebijakan Publik dan Pembangunan*, 3(2), 134–148. <https://doi.org/10.52334/jkpp.v3i2.2034>